



**IKHTISAR LHKPN a.n JUNAIDI HARTONI  
(Jenis Laporan - Tahun: Khusus (Awal Menjabat) – 2023)  
NIK 1371111606860010**

**1. DATA PRIBADI**

Nama	:	JUNAIDI HARTONI
NIK	:	1371111606860010
No KK	:	-
NPWP	:	163203425201000
Jenis Kelamin	:	Laki Laki
Tempat/Tanggal Lahir	:	PADANG/16 Juni 1986
Status Nikah	:	Belum Kawin
Agama	:	ISLAM
Alamat	:	JL. SUMATERA GANG 1 NO. A7B, LEMBAH SEGAR, KOTA SAWAH LUNTO, SUMATERA BARAT
Nomor Handphone	:	082127811101
Email	:	muhammadzafranalfarizi8@gmail.com
NHK	:	-
Bidang	:	EKSEKUTIF
Lembaga	:	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Jabatan	:	KETUA - BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAH LUNTO - BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
Tanggal Lapor	:	31 Desember 2023
Tanggal Kirim	:	13 Maret 2024
Status	:	Proses Verifikasi



## 2. DATA KELUARGA

NO	NAMA	HUBUNGAN DENGAN PN	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR / JENIS KELAMIN	PEKERJAAN	ALAMAT RUMAH
1	REFTI SAFTIANI	ISTRI	SAWAHLUNTO , 11 September 1990 / Perempuan	IBU RUMAH TANGGA	JL. SUMATERA GANG 1 NO. A7B, Kelurahan TANAH LAPANG, Kecamatan LEMBAH SEGAR, KOTA SAWAHLUNTO , Provinsi SUMATERA BARAT
2	MUHAMMAD ZAFRAN ALFARIZI	ANAK TANGGUNGAN	SAWAHLUNTO , 13 November 2016 / Laki-Laki	-	JL. SUMATERA GANG 1 NO. A7B, Kelurahan TANAH LAPANG, Kecamatan LEMBAH SEGAR, KOTA SAWAHLUNTO , Provinsi SUMATERA BARAT
3	IBRAHIM HAFIDZ AL-HAQ	ANAK TANGGUNGAN	TANAH DATAR , 13 Mei 2021 / Laki-Laki	-	JL. SUMATERA GANG 1 NO. A7B, Kelurahan TANAH LAPANG, Kecamatan LEMBAH SEGAR, KOTA SAWAHLUNTO , Provinsi SUMATERA BARAT

## 3. JABATAN

NO	JABATAN - DESKRIPSI JABATAN / ESELON	LEMBAGA	UNIT KERJA	SUB UNIT KERJA
1	KETUA	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

## 4. DATA HARTA

### 4.1. TANAH / BANGUNAN

NO	LOKASI	LUAS	KEPEMILIKAN	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAATINI	KETERANGAN
			Sub Total		Rp. 0	



**4.2. ALAT TRANSPORTASI / MESIN**

NO	URAIAN	KEPEMILIKAN	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
1	Jenis : MOTOR Merk : SUZUKI Model : FW110SCD Tahun Pembuatan : 2010 No. Pol. / Registrasi : BA 3220 BN	Jenis Bukti: BPKB/STNK Asal Usul Harta: HASIL SENDIRI Atas Nama: PN YANG BERSANGKUTAN Pemanfaatan: DIGUNAKAN SENDIRI Lainnya: - Tahun Perolehan: 2010	Rp. 0	Rp. 3.000.000	-
Sub Total				Rp. 3.000.000	

**4.3. HARTA BERGERAK LAINNYA**

NO	URAIAN	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
1	Jenis : PERHIASAN & LOGAM/BATU MULIA Jumlah : 4 Satuan : EMAS Ket. Lainnya : PERHIASAN ISTRI Tahun Perolehan: 2023	HASIL SENDIRI	Rp. 0	Rp. 10.000.000	-
Sub Total				Rp. 10.000.000	

**4.4. SURAT BERHARGA**

NO	URAIAN	NO. REKENING / NO. NASABAH	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
			Sub Total		Rp. 0	

**4.5. KAS / SETARA KAS**



NO	URAIAN	INFORMASI REKENING	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
1	Jenis : TABUNGAN Keterangan : - Nama Bank / Lembaga : BRI	Nomor : 547201007406534 Atas Nama : PASANGAN/ANAK (REFTI SAFTIANI)	HASIL SENDIRI	Rp. 4.000.000	-
2	Jenis : TABUNGAN Keterangan : - Nama Bank / Lembaga : BNI	Nomor : 1158810021 Atas Nama : PN YANG BERSANGKUTAN	HASIL SENDIRI	Rp. 6.890.131	-
			Sub Total	Rp. 10.890.131	

#### 4.6. HARTA LAINNYA

NO	URAIAN	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
		Sub Total		Rp. 0	

#### 4.7. HUTANG

NO	URAIAN	NAMA KREDITUR	BENTUK AGUNAN	NILAI AWAL HUTANG	NILAI SALDO HUTANG
1	Jenis : HUTANG KONSUMTIF (KPR, KENDARAAN, KARTU KREDIT, MULTIGUNA) Atas Nama : PN YANG BERSANGKUTAN	BMT TAQWA MUHAMADIYAH	BPKB	Rp. 27.000.000	Rp. 20.000.000
			Sub Total	Rp. 27.000.000	Rp. 20.000.000

#### 5. PENERIMAAN

##### 5.1. PENERIMAAN DARI PEKERJAAN



NO	JENIS PENERIMAAN	PENYELENGGARA NEGARA	PASANGAN
1	Gaji dan Tunjangan	Rp. 80.000.000	Rp. 0
2	Penghasilan dari Profesi/Keahlian	Rp. 0	Rp. 0
3	Honorarium	Rp. 30.000.000	Rp. 0
4	Tantiem, Bonus, Jasa Produksi, THR	Rp. 4.970.000	Rp. 0
5	Penerimaan Pekerjaan Lainnya	Rp. 0	Rp. 0
Sub Total		Rp. 114.970.000	Rp. 0

#### 5.2. PENERIMAAN DARI USAHA DAN KEKAYAAN

NO	JENIS PENERIMAAN	TOTAL PENERIMAAN KAS
1	Hasil Investasi dalam Surat Berharga	Rp. 0
2	Hasil Usaha/Sewa	Rp. 0
3	Bunga Tabungan/Deposito dan Lainnya	Rp. 0
4	Penjualan atau Pelepasan Harta	Rp. 0
5	Penerimaan Lainnya	Rp. 0



NO	JENIS PENERIMAAN	TOTAL PENERIMAAN KAS
	Sub Total	Rp. 0

### 5.3. PENERIMAAN LAINNYA

NO	JENIS PENERIMAAN	TOTAL PENERIMAAN KAS
1	Penerimaan Hutang	Rp. 0
2	Penerimaan Warisan	Rp. 0
3	Penerimaan Hibah/Hadiah	Rp. 0
4	Lainnya	Rp. 0
	Sub Total	Rp. 0

## 6. PENGELOUARAN

### 6.1. PENGELOUARAN RUTIN

NO	JENIS PENGELOUARAN	TOTAL NILAI PENGELOUARAN
1	Biaya Rumah Tangga (termasuk transportasi, pendidikan, kesehatan, rekreasi, pembayaran kartu kredit)	Rp. 96.000.000
2	Biaya Sosial (antara lain keagamaan, zakat, infaq, sumbangan lain)	Rp. 5.000.000



NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL NILAI PENGELUARAN
3	Pembayaran Pajak (antara lain PBB, kendaraan, pajak daerah, pajak lain)	Rp. 250.000
4	Pengeluaran Rutin Lainnya	Rp. 10.000.000
	Sub Total	Rp. 111.250.000

#### 6.2. PENGELUARAN HARTA

NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL NILAI PENGELUARAN
1	Pembelian/Perolehan Harta Baru	Rp. 0
2	Pemeliharaan/Modifikasi/Rehabilitasi Harta	Rp. 0
3	Pengeluaran Non Rutin Lainnya	Rp. 0
	Sub Total	Rp. 0

#### 6.3. PENGELUARAN LAINNYA

NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL NILAI PENGELUARAN
1	Biaya Pengurusan Waris/Hibah/Hadiah	Rp. 0
2	Pelunasan/Angsuran Hutang	Rp. 0



NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL NILAI PENGELUARAN
3	Pengeluaran Lainnya	Rp. 0
	Sub Total	Rp. 0

#### 7. LAMPIRAN FASILITAS

NO	URAIAN	NAMA PIHAK PEMBERI FASILITAS	KETERANGAN
1	Jenis : MOBIL DINAS Keterangan : TOYOTA AVANZA BA 1138 BI	BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	TOYOTA AVANZA BA 1138 BI

#### 8. TOTAL HARTA KEKAYAAN

NO	TOTAL HARTA	TOTAL HUTANG	TOTAL HARTA KEKAYAAN
1	Rp. 23.890.131	Rp. 20.000.000	Rp. 3.890.131

Catatan :

Rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan melalui elhkpn.kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.

Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.